

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA
WATUKARUNG KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN (STUDI PADA
POKDARWIS DESA WATUKARUNG)**

Nindy Arista Ariani

S1 Ilmu Administasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

nindy.19065@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakutlas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan penyumbang pendapatan terbesar yang dapat mendongkrak perekonomian dari daerah hingga nasional. Pemanfaatan potensi wisata dapat diterapkan guna meningkatkan perekonomian suatu daerah. Desa Watukarung merupakan salah satu desa di Kabupaten Pacitan dengan potensi wisata terbanyak memiliki sekitar 14 titik wisata yang dapat dikembangkan. Pengembangan pariwisata tentu membutuhkan peran aktif masyarakat, dalam hal ini Desa Watukarung memiliki Pokdarwis sebagai aktor pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Desa Watukarung. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang meliputi *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Sumber data berasal dari informan dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata Desa Watukarung berjalan dengan baik. Upaya *enabling* oleh Pokdarwis Tirta Mukti dan Pokdarwis Selogoni sudah dilakukan dengan analisis potensi wisata dan pelibatan masyarakat meskipun masih dibutuhkan peningkatan pada Pokdarwis Selogoni. Upaya *empowering* dilakukan dengan penguatan branding wisata, pembangunan sarana dan prasarana, serta pelatihan sadar wisata kepada masyarakat. Upaya *protecting* dilakukan dengan menjaga kepentingan masyarakat lemah, juga adanya upaya pembangunan legalitas kelompok. Sehingga peneliti memberikan saran yaitu perlunya kelanjutan dari analisis potensi wisata yang di lakukan, keterlibatan dinas dalam pengembangan wisata, dan inovasi promosi wisata.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pokdarwis, Pengembangan Wisata

Abstract

Tourism is the biggest contributor that can boost the economy from regional to national. Watukarung Village is one of the villages in Pacitan Regency with the most tourism potential having around 14 tourist points that can be developed. Watukarung Village has Pokdarwis as community empowerment actors in developing tourism. The purpose of this research is to describe community empowerment efforts by Pokdarwis in developing tourism in Watukarung Village. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is community empowerment efforts which include *enabling*, *empowering*, and *protecting*. Sources of data come from informants and supporting documents. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that community empowerment through tourism development in Watukarung Village is going well. Enabling efforts by Pokdarwis Tirta Mukti and Pokdarwis Selogoni have been carried out with an analysis of tourism potential and community involvement, although improvements are still needed for Pokdarwis Selogoni. Empowering efforts are carried out by strengthening tourism branding, building facilities and infrastructure, as well as tourism awareness training for the community. Efforts to protect are carried out by safeguarding the interests of the weak community, as well as efforts to develop group legality. So that researchers provide suggestions, namely the need for continuation of the analysis of tourism potential that is being carried out, agency involvement in tourism development, and tourism promotion innovation.

Keywords: Community Empowerment , Pokdarwis , Development Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu penyumbang besar bagi pendapatan suatu daerah. Sektor pariwisata harus terus dikelola sehingga menjadi potensi yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Karini & Agustiani, 2019). Pariwisata memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor lapangan pekerjaan dan perekonomian diiringi dengan pembangunan di sektor pariwisata (Luthfi, 2013). Telah diuji di beberapa daerah bahwa pendapatan masyarakat yang memanfaatkan objek wisata lebih tinggi dari masyarakat yang tidak memanfaatkan objek wisata sebagai sumber pendapatan (Susanti & Aidar, 2017). Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Melihat besarnya potensi wisata tentunya perlu sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Menurut (Sabtimarlia, 2015) Pariwisata yang dikelola masyarakat bekerjasama dengan daerah merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Dalam pengembangan wisata, pada beberapa bidang dimungkinkan adanya program swadaya yang menjadi inisiasi untuk lebih mengoptimalkan pengembangan wisata (Amirudin, 2018). Pelibatan masyarakat dalam mengembangkan wisata merupakan pilihan tepat, akan tetapi hingga saat ini masih banyak wisata yang belum digali secara optimal. Masih ada beragam potensi wisata alam maupun kebudayaan di Indonesia yang belum digarap dengan maksimal dan harus terus digali dan dikembangkan (Airin, 2019).

Dalam mengelola potensi pariwisata berbasis masyarakat maka diperlukan pemberdayaan masyarakat agar pengembangan potensi pariwisata menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Pembangunan berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam upaya mewujudkannya membutuhkan peran serta masyarakat yang ikut terlibat dan mendukung (Nurwahyuni & Ma'ruf, 2021). Menurut (Andriyanto & Wihayati, 2021) pemberdayaan merupakan upaya menaikkan taraf hidup masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan, dll dengan pelatihan dan pelibatan dalam berbagai kegiatan. Konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat yang mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam memecahkan permasalahan di desa maupun daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya desentralisasi dan kemandirian daerah (Yatmaja, 2019). Selain itu (Karim et al., n.d.) juga mengemukakan bahwa dalam pembangunan pariwisata, peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan pemberdayaan

(empowerment) agar masyarakat lebih aktif sehingga pengembangan wisata lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berperan penting bagi dalam berkembangnya pariwisata dan menaikkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan kondisi alam yang meliputi wilayah dataran rendah, pantai, dan perbukitan dengan persentase dataran tinggi dan perbukitan mencapai 85%, daerah bergelombang 10%, dan 5% daerah datar (BPS, 2020) Kabupaten Pacitan dikenal memiliki potensi wisata yang begitu besar. Pacitan merupakan daerah pesisir yang memiliki objek-objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi seperti pantai, goa, dll (Evitin & Widodo, 2016). Dengan banyak dan beragamnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan menyebabkan sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata sebagai sektor strategis di Kabupaten Pacitan juga tertuang di dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, 2013) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang menetapkan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang didalamnya terbentuk citra daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, 2013) juga ditulis bahwa bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada. Artinya pengembangan pariwisata menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah sejalan dengan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harus menjadi perhatian dan dapat lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

Konsep pengembangan dengan model pemberdayaan masyarakat dapat menjadi upaya dalam menstimulasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal (Ramdhani & Rahaju, 2022). Pemberdayaan masyarakat terbukti dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi masyarakat (Nawangsari, 2017). Akan tetapi

hingga saat ini belum terlihat adanya perkembangan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan dalam bidang pariwisata. Berdasarkan wawancara dengan bapak Hayam Ardi Wirawan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan sebagai berikut.

“yang selama ini terjadi di Pacitan pemberdayaan masyarakatnya ya hanya seputar pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, drainase, irigasi, dan peningkatan kualitas dan kuantitas posyandu. Untuk pemberdayaan di bidang pariwisata sendiri itu melalui BUMD dan kemarin baru ada pembangunan untuk mengatasi longsor tebing, tetapi untuk pemberdayaan dalam hal peningkatan kualitas SDM seperti pelatihan-pelatihan masih jarang dilaksanakan dan tidak sustainable” (Hayam Ardi Wirawan, 8 November 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Pacitan masih didominasi pembangunan infrastruktur desa dan belum ada yang fokus terhadap pengembangan SDM utamanya dalam mengelola pariwisata.

Desa Watukarung merupakan salah satu desa di Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah pesisir pantai selatan dengan lanskap berupa dataran rendah dan pantai, memiliki potensi wisata bahari berupa pantai dan aliran sungai. Salah satu yang terkenal yaitu pantai Watukarung. Menurut (Sayogi & Demartoto, 2018) pantai Watukarung merupakan salah satu destinasi wisata yang mulai dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara dengan daya tarik berupa pasir putih yang halus, ombak yang cocok untuk berselancar, serta gugusan pulau-pulau kecil disekitarnya.

Tabel 1.2 Data Pengunjung Wisata Kabupaten Pacitan

Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung Tahun 2019
Pantai Klayar	699.429
Goa Gong	358.346
Pantai Watukarung	252.935
Banyu Anget	136.325
Pantai Srau	115.071
Pantai Pancer Door	54.985
Pantai Buyutan	46.072
Pantai Taman	24.416
Goa Tabuhan	21.544

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan

Dari data pengunjung wisata di Kabupaten Pacitan dapat dilihat bahwa Pantai Watukarung merupakan objek wisata dengan pengunjung tertinggi ketiga setelah Pantai Klayar dan Goa Gong. Hal ini menjadi potensi besar bagi Desa Watukarung di bidang pariwisata. Selain pantai Watukarung, Desa Watukarung juga memiliki banyak potensi pariwisata lain. Berdasarkan observasi awal dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan diketahui bahwa Desa Watukarung memiliki potensi terbesar di Kabupaten Pacitan dengan total 14 tempat berpotensi wisata yang meliputi pantai, sungai, dan wisata bukit.

Dalam pengembangan pariwisata di Desa Watukarung, pemerintah desa sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dan juga pihak swasta. Selain itu usaha pengembangan wisata di Desa Watukarung juga dilakukan dengan pembetukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang bertugas sebagai pelopor pengembangan wisata di Desa Watukarung

Adanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di desa Watukarung merupakan salah satu langkah yang diambil guna meningkatkan pengelolaan pariwisata. Dalam (Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Di Destinasi Pariwisata, 2012) Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan pelaku kepariwisataan yang peduli dan bertanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam tumbuh kembangnya kepariwisataan untuk pembangunan daerah dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Desa Watukarung.

Desa Watukarung memiliki dua kelompok sadar wisata yang mengembangkan dan mengelola pariwisata di Desa Watukarung. Kelompok tersebut yaitu Pokdarwis Selogoni dan Pokdarwis Tirta Mukti. Kedua Pokdarwis tersebut bergerak di dua bagian wisata Desa Watukarung yaitu Pokdarwis Selogoni mengembangkan dan mengelola pariwisata sisi barat dan Pokdarwis Tirta Mukti mengelola dan mengembangkan pariwisata sisi timur.

Besarnya potensi wisata yang dimiliki Desa Watukarung merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus disiapkan untuk mendorong kemajuan desa dan perekonomian masyarakat. peningkatan wisata menjadi peluang dan tantangan untuk mengembangkannya (Satriana & Faridah, 2018). Akan tetapi dalam proses pengembangan wisata di Desa Watukarung masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, banyaknya potensi wisata yang belum digali secara maksimal, dan

kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi wisata sebagai penunjang perekonomian.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pariwisata yang dikelola masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga daerah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Pariwisata Desa Watukarung (Studi pada Pokdarwis Desa Watukarung)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Mardikanto & Soebianto, 2015). Upaya pemberdayaan masyarakat meliputi *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam (Hardani et al., 2020) yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi fokus utama pembangunan Desa Watukarung karena diketahui bahwa penyumbang pendapatan terbesar di Desa Watukarung berasal dari sektor pariwisata. Selain meningkatkan pendapatan desa, pengembangan pariwisata dan pemanfaatan potensi wisata juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Watukarung utamanya masyarakat sekitar tempat wisata.

Berbagai cara dan terobosan dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan pariwisata melalui pengembangan dan pengelolaannya. Oleh karena itu, terbentuklah kelompok yang fokus pada bidang pariwisata atau yang dikenal dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Di Desa Watukarung sendiri terdapat 2 Pokdarwis yang terbentuk untuk mengelola potensi wisata di sisi timur dan sisi barat Desa Watukarung. Adanya Pokdarwis tentu diharapkan mendorong masyarakat untuk dapat turut dan mengembangkan dan mengelola tempat wisata salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata Desa Watukarung

Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan (studi pada pokdarwis Desa Watukarung) dikaji dengan pendekatan aspek pemberdayaan menurut (Mardikanto 2015) sebagai berikut :

1) *Enabling* (Pemungkinan)

Enabling (pemungkinan) merupakan upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat atau hal-hal yang menghambat masyarakat untuk menaikkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun daya yaitu dengan mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Enabling* (pemungkinan) memiliki makna yang sama dengan upaya persiapan yaitu dengan melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pemberdayaan berupa persiapan teknis serta membuat konsep atau rancangan kegiatan.

Enabling (pemungkinan) dalam hal pengembangan pariwisata terutama pada spot wisata sisi timur Desa Watukarung yang dilakukan Pokdarwis yaitu dengan analisis potensi wisata hingga ditemukan tempat yang cocok untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Kemudian Pokdarwis mengajak beberapa masyarakat utamanya masyarakat pesisir dan pemilik lahan sekitar objek wisata untuk berkumpul bersama melakukan musyawarah mengenai rencana pengembangan wisata yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori Kartasmita dalam (Tanjung, 2016) mengungkapkan bahwa sebelum melakukan pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, maka terlebih dahulu masyarakat perlu didorong, dimotivasi, dan dibangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan untuk mewujudkan hal ini, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah melalui pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan program pemberdayaan yang dicanangkan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelum dijalankannya pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata sisi timur Desa Watukarung merupakan salah satu visi Kepala Desa Watukarung dan komitmen Pemerintah Desa Watukarung yang ini menata seluruh potensi yang ada di Desa Watukarung utamanya pariwisata sisi timur Desa Watukarung. Berangkat dari visi tersebut Pemerintah Desa Watukarung melakukan analisis potensi wisata mulai analisis fisik hingga analisis SDM calon pengelola wisata. Setelah melakukan analisis potensi wisata dan analisis SDM, selanjutnya Pemerintah Desa membentuk BumDes dan mendukung pembentukan Pokdarwis

sebagai aktor pemberdaya masyarakat dalam pengembangan pariwisata tersebut.

Enabling dikaitkan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat bisa berkembang. Dalam hal ini Pemerintah Desa Watukarung sudah melakukan upaya *enabling* dengan melakukan analisis potensi wisata dan analisis SDM yang selanjutnya dibentuk BumDes serta Pokdarwis sebagai aktor pemberdaya masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya menciptakan suasana yang mendukung kegiatan pemberdayaan yaitu melalui analisis awal dan pembentukan aktor pemberdaya yang akan sangat membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan efektif dan pariwisata dapat berkembang sesuai yang diharapkan.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Desa Watukarung yaitu dengan membuat prioritas pembangunan desa yang difokuskan pada pengembangan pariwisata. Hal tersebut ditunjukkan melalui prioritas penggunaan dana desa yang sebagian besar digunakan untuk pengembangan pariwisata. Ini menunjukkan adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Desa Watukarung terhadap perkembangan wisata di Desa Watukarung.

Dalam kegiatan pengembangan pariwisata pada aksi persiapan tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di daerah pesisir yang memiliki lahan untuk kemudian diajak diskusi mengenai rencana pengembangan pariwisata oleh Pokdarwis Tirto Mukti. Hasil dari pertemuan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat yang dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang langsung menyetujui dan mendukung rencana pengembangan wisata tersebut.



Gambar 1 Musyawarah awal bersama masyarakat pesisir

Sumber : Arsip Pokdarwis Tirto Mukti

Adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat dalam melakukan pengembangan pariwisata tersebut didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi adalah keadaan ekonomi masyarakat. Telah diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Watukarung sebelum adanya pariwisata adalah sebagai seorang nelayan dan petani yang dimana hasil dari pekerjaan tersebut tidak stabil. Sehingga sambutan baik masyarakat yang akan diberdayakan dalam pengembangan wisata juga merupakan harapan dari masyarakat untuk memperoleh pendapatan tambahan selain pekerjaan utamanya yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan maupun petani.

Dukungan dari masyarakat dalam upaya *enabling* yang dilakukan Pokdarwis Tirto Mukti yaitu dengan merelakan lahan yang dimiliki masyarakat untuk digunakan sebagai fasilitas umum seperti jalan dll.

Setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat terkait pengembangan pariwisata, kemudian dilakukan buka akses ke wisata Pantai Kasap yang sebelumnya telah dikenal beberapa wisatawan. Dari hasil buka akses awal tersebut ditemukan bahwa terdapat potensi besar apabila wisata Pantai Kasap ini terus dikembangkan.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, untuk Pokdarwis Selogoni belum terlihat adanya upaya *enabling* yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sisi barat Desa Watukarung merupakan pengelola wisata yang sejak dulu sudah memiliki usaha di sekitar Pantai Watukarung sehingga masyarakat sudah memiliki kesadaran yang baik terhadap potensi Pantai Watukarung. Upaya *enabling* pada Pokdarwis Selogoni dilakukan dengan menganalisis potensi-potensi lain di sekitar Pantai Watukarung. Akan tetapi belum terlihat adanya upaya mendorong kesadaran masyarakat terhadap potensi lain yang ada di sekitar Pantai Watukarung.

Ditinjau dari upaya pemberdayaan masyarakat menurut (Mardikanto & Soebianto, 2015) upaya *enabling* atau pemungkinan dikaitkan dengan upaya membangun daya kepada masyarakat. Adapun secara rinci disebutkan bahwa upaya untuk membangun daya tersebut dilakukan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat terkait potensi yang dimiliki.

Dalam hal ini upaya *enabling* yang dilakukan Pokdarwis Tirto Mukti sudah sesuai dibuktikan dengan adanya ajakan musyawarah kepada masyarakat dan penjelasan terkait adanya potensi wisata yang bisa dikembangkan di lahan masyarakat yang berada di pesisir pantai. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya membangkitkan kesadaran masyarakat terkait adanya potensi serta mendorong masyarakat untuk

memanfaatkan potensi tersebut dengan mengembangkan pariwisata di lahan mereka. Dapat dilihat juga adanya respon yang baik dari masyarakat dan berupaya untuk mengembangkannya.

Sedangkan untuk upaya yang dilakukan Pokdarwis Selogoni belum dapat dikatakan sesuai dengan teori upaya *enabling* karena belum adanya pelibatan masyarakat terhadap potensi lain yang ada di sekitar Pantai Watukarung. Akan tetapi sudah adanya upaya pemungkinan melalui analisis potensi yang dilakukan.

Kegiatan pemungkinan lain yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan berupa pelatihan serta pameran wisata di Bon Pring Malang yang diwakili oleh Bapak Kiswo Sutanda yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Pokdarwis Tirta Mukti.

Hasil dari pelatihan tersebut, Pokdarwis Tirta Mukti mendapat ilmu salah satunya penataan wisata dan yang akan diterapkan yaitu usaha penginapan model *homestay* dimana wisatawan tinggal berdampingan dengan pemilik rumah. Hal tersebut sesuai dengan aspek *Accommodation* dalam 6 komponen pengembangan wisata menurut Buhalis dalam (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020).

Kegiatan pelatihan dan pameran wisata tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya *enabling* atau pemungkinan dari Pokdarwis Tirta Mukti yaitu mengumpulkan informasi serta inspirasi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Watukarung. Sehingga setelah pulang dari kegiatan tersebut, ilmu yang didapatkan dari Bon Pring Malang dapat dibagikan kepada masyarakat dan digunakan sebagai inspirasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

2) *Empowering* (Penguatan)

Empowering atau penguatan berarti memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Selain menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan pemberdayaan masyarakat, upaya lain yang harus dilakukan yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dalam memanfaatkan potensi di dirinya sendiri dan lingkungannya. Penguatan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pengambilan langkah-langkah nyata dan pemberian beberapa masukan kepada masyarakat yang diberdayakan untuk membangun pola pikir serta kemampuan yang dimiliki masyarakat. Diperlukan juga hal-hal yang mendukung berjalannya pemberdayaan masyarakat yaitu berupa pembangunan sarana dan

prasarana, fasilitas-fasilitas yang memadai, yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini upaya awal yang dilakukan Pokdarwis Tirta Mukti yaitu dengan memperkuat *branding* tempat wisata yang sedang dikembangkan. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa cara unik seperti menggandeng beberapa club motor untuk mengunjungi Pantai Kasap, mengundang influencer untuk ikut mempromosikan hingga Pantai Kasap mendapat julukan *Raja Ampatnya Pacitan*. Selain itu Pokdarwis juga sempat mengundang acara tv nasional yaitu Si Bolang untuk mengenalkan wisata di Desa Watukarung ke jaringan yang lebih luas. Pokdarwis juga membangun fasilitas berupa tempat selfie yang cantik dengan harapan tempat tersebut dapat menjadi *icon* atau ciri khas dari Pantai Kasap sekaligus lahan untuk mempromosikan wisata.

Dikaitkan dengan upaya *empowering* menurut (Mardikanto & Soebianto, 2015) upaya yang dilakukan Pokdarwis Tirta Mukti tersebut masuk kedalam pembukaan akses ke berbagai peluang. Dari *branding* wisata yang telah dilakukan secara otomatis hal tersebut dapat membuka akses ke berbagai peluang yang pertama yaitu kemungkinan penambahan pengunjung yang datang ke tempat wisata. Kemudian dari banyaknya pengunjung yang datang masyarakat dapat membangun fasilitas seperti usaha warung, toilet berbayar, serta tempat parkir sehingga hal tersebut dapat menjadi pemasukan tambahan untuk masyarakat.

Selanjutnya *empowering* juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Watukarung yaitu dengan mengadakan padat karya tunai pembangunan jalan setapak menuju tempat wisata yang dimana kegiatan tersebut sekaligus bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Selain mengadakan padat karya tunai membangun jalan setapak menuju tempat wisata, Pemerintah Desa Watukarung juga membangun beberapa sarana dan prasarana lain seperti mushola dan aula serta dibangun juga tempat *selfie* tambahan untuk wisatawan yang ingin berfoto dengan latar berbeda.

Akan tetapi berdasarkan observasi sekaligus wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah Desa Watukarung masih sangat terbatas karena terbatasnya lahan yang dimiliki negara. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana yang lain dibangun di tanah milik pribadi masyarakat sekitar.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Watukarung tersebut sudah sesuai dengan upaya *empowering* menurut (Mardikanto & Soebianto, 2015) yaitu membangun sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat dapat berkembang.

Berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa aula yang dibangun oleh Pemerintah Desa saat ini digunakan Pokdarwis bersama masyarakat untuk melakukan pertemuan bulanan membahas pengembangan wisata.

Ditinjau dari 6 komponen pengembangan wisata dalam (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) pembangunan sarana prasarana yang dilakukan oleh Pokdarwis Tirta Mukti dan Pemerintah Desa Watukarung juga sesuai dengan aspek *Amenities* (fasilitas) dimana usaha yang dilakukan berusaha memenuhi fasilitas yang dibutuhkan wisatawan di tempat wisata.

Meskipun jika ditinjau dari komponen *Ancillary Services* (layanan pendukung) layanan yang seharusnya diperoleh dari organisasi terkait dan juga pemerintah, dukungan yang diberikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi masih belum optimal dan tentunya membutuhkan peningkatan respon lebih baik dari dinas terkait. Kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan juga tertuang dalam Pasal 23 ayat (1)c (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009) yang berbunyi memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai.

Setelah memperkuat *branding* dan membangun sarana prasarana, upaya *empowering* selanjutnya yang dilakukan Pokdarwis Tirta Mukti yaitu membangun mindset masyarakat utamanya masyarakat yang memiliki warung di daerah wisata. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak menjual makanan dan minuman dengan harga yang terlalu tinggi serta menyamakan harga di setiap warung. Penyadaran ini dilakukan secara bertahap dengan mengunjungi lima warung per minggu hingga seluruh warung melakukan hal yang sama. Dan untuk menjaga harga tersebut tetap sesuai Pokdarwis juga melakukan kontrol setiap bulannya sekaligus memberi masukan untuk perkembangan warung yang dimiliki masyarakat.

Upaya yang dilakukan Pokdarwis tersebut sudah sesuai dengan upaya *empowering* menurut (Mardikanto & Soebianto, 2015) yaitu membangun kesadaran masyarakat serta pemberian masukan-masukan yang membangun guna berkembangnya pemikiran masyarakat. Sudah terbukti bahwa yang dilakukan Pokdarwis Tirta Mukti sudah sesuai dengan teori tersebut.



Gambar 2 Warung di Pantai Kasap

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Selain menata warung Pokdarwis Tirta Mukti juga mendorong pembangunan Wisata Kali Cokel di Desa Watukarung dengan cara membangun wisata susur sungai menggunakan perahu yang dimana dalam pembangunan dan pengelolaannya saat ini sudah dikelola secara penuh oleh masyarakat. Sehingga dapat dilihat disini bahwa kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata sudah mulai terbentuk dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa wisata Kali Cokel yang ada di Desa Watukarung juga memenuhi komponen *activities* menurut Buhalis, 2000 yang dikutip dalam (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) adanya aktivitas yang dapat dilakukan di tempat wisata akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman unik dan menyenangkan.

Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak didapatkan kesimpulan bahwa walaupun Wisata Kali Cokel sudah dikelola secara mandiri oleh masyarakat, masih dibutuhkan beberapa pelatihan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Pelatihan yang diinginkan tersebut salah satunya seperti cara melayani wisatawan dengan baik agar wisatawan mendapat kesan tersendiri setelah mengunjungi wisata susur sungai Kali Cokel.

Selanjutnya Pemerintah Desa Watukarung juga memberikan dukungan berupa pelatihan UMKM untuk ibu-ibu PKK yaitu membuat produk khas Desa Watukarung serta mengadakan pelatihan membuat batik. Selain mengadakan pelatihan, Pemerintah Desa juga gencar melakukan promosi ke luar Desa Watukarung untuk mengenalkan batik khas Desa Watukarung kepada masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya saat ini pembuatan batik dan produk makanan tersebut belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan antusiasme yang kurang dari ibu-ibu di Desa Watukarung.

Selain mengadakan pelatihan UMKM dan membuat batik untuk ibu-ibu PKK, Pemerintah Desa Watukarung juga mengadakan pelatihan untuk pemuda Karang Taruna Desa Watukarung untuk dijadikan pemandu wisata bersertifikat. Hasil dari pelatihan tersebut didapatkan banyak pemuda di Desa Watukarung yang sudah memiliki sertifikat resmi pemandu wisata. Akan tetapi berdasarkan observasi peneliti hingga saat ini di Desa Watukarung belum ada program wisata yang secara khusus dibimbing oleh pemandu wisata tersebut.

Sedangkan untuk upaya *empowering* yang dilakukan Pokdarwis Selogoni untuk membuat masyarakat lebih berdaya yaitu dengan memberikan daya dukung berupa lokasi khusus warung di tepi Pantai Watukarung. Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pokdarwis Selogoni, Pemerintah Desa Watukarung, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Selain memberi daya dukung berupa lokasi, Pokdarwis Selogoni juga menyamakan harga di setiap warung di Pantai Watukarung yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan sehingga warung milik masyarakat dapat berjalan terus menerus.

Ditinjau dari upaya *empowering* menurut (Mardikanto & Soebianto, 2015) upaya yang dilakukan oleh Pokdarwis Selogoni tersebut sudah sesuai karena kerdapat daya dukung berupa sarana dan prasarana. Selain itu juga terdapat upaya membangun mindset menjaga kepercayaan dan kenyamanan wisatawan terhadap warung di tepi Pantai Watukarung.

Kemudian upaya lanjutan yang dilakukan Pokdarwis Selogoni yaitu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan tempat wisata. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan kerja bakti mingguan yang dilaksanakan oleh Pokdarwis bersama masyarakat.

Selanjutnya dilakukan pula pelatihan membuat produk bagi masyarakat sebagai produk khas Desa Watukarung. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Desa Watukarung sudah memiliki komitmen tinggi terhadap kebersihan Pantai Watukarung. Hal tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

3) *Protecting* (Perlindungan)

Upaya perlindungan ini berarti melindungi masyarakat terutama kelompok yang lemah agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang yang harus dilakukan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Dalam proses pemberdayaan harus

dicegah agar yang lemah tidak bertambah lemah dan dapat terus berkembang.

Dalam upaya *protecting* atau perlindungan yang dilakukan Pokdarwis Tirta Mukti yaitu dengan menerapkan beberapa aturan yang harus ditaati oleh wisatawan maupun pengelola wisata. Adapun aturan tersebut yang pertama yaitu tidak diizinkan pembangunan minimarket seperti *alfamaret* dan *indomaret* di area wisata maupun di lingkungan Desa Watukarung. Hal ini bertujuan untuk mencegah matinya warung-warung kecil milik masyarakat sehingga wisatawan tetap membeli apapun di warung yang disediakan oleh masyarakat sendiri. Aturan kedua yaitu tempat parkir dibangun sedikit jauh dari tempat wisata melewati warung-warung milik masyarakat dan wisatawan diwajibkan untuk berjalan kaki menuju tempat wisata. Hal ini bertujuan agar wisatawan yang berjalan kaki dapat melewati warung dengan pelan dan memperbesar kemungkinan wisatawan untuk mampir ke warung milik masyarakat tersebut.

Ditinjau dari upaya pemberdayaan masyarakat menurut (Mardikanto & Soebianto, 2015) *protecting* atau perlindungan yang dilakukan Pokdarwis Tirta Mukti terhadap masyarakat sudah sesuai yaitu melindungi terjadinya persaingan tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Dengan adanya larangan pembangunan minimarket seperti *alfamaret* dan *indomaret* tersebut membuktikan bahwa Pokdarwis telah melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang. Selain itu aturan berjalan kaki kepada wisatawan juga termasuk upaya perlindungan dari Pokdarwis Tirta Mukti untuk warung yang dibangun masyarakat.

Kemudian upaya *protecting* yang dilakukan Pokdarwis Tirta Mukti yaitu usaha legalitas kelompok dan pembuatan asuransi wisata perahu Kali Cokel. Akan tetapi dalam pelaksanaannya usaha legalitas dan pembuatan asuransi tersebut mengalami kendala hingga saat ini diketahui bahwa Pokdarwis Tirta Mukti belum memiliki SK dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan.



Gambar 3 Wisata Kali Cokel
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Ditinjau dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009) dalam upaya pengusahaan legalitas kelompok dan asuransi wisata Kali Cokel masih belum terlihat adanya peran dinas terkait. Sedangkan dalam undang undang tersebut terdapat salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam kepariwisataan yaitu memberikan legalitas, kepastian hukum, dan memastikan keselamatan wisatawan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 23 ayat (1)a yang berbunyi

“Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan” (Pasal 23 ayat (1)a Undang Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata)

Oleh karena itu diharapkan ada dukungan lebih dari dinas terkait dalam upaya legalitas dari Pokdarwis Tirta Mukti dan wisata Kali Cokel.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Pariwisata Desa Watukarung (Studi pada Pokdarwis Desa Watukarung) upaya pemberdayaan dilakukan dengan melakukan analisis potensi, pelatihan dan penyadaran tentang pariwisata, pembangunan sarana prasarana, serta pengupayaan legalitas. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan Pokdarwis Desa Watukarung dalam memberdayakan masyarakat sudah sesuai dengan teori upaya pemberdayaan masyarakat yang meliputi *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Selain itu pengembangan pariwisata yang dilakukan juga sesuai dengan 6 komponen pengembangan pariwisata yaitu *Attraction*, *Accommodation*, *Amenities*, *Ancillary services*, *Activity* dan *Accessibilities*. Serta Pasal 4 Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Akan tetapi masih perlu peningkatan dalam dukungan Pemerintah Daerah atau Dinas Terkait serta kurangnya inovasi dalam promosi wisata.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan selain melakukan sosialisasi, Pokdarwis dan Pemerintah Desa dapat melakukan kolaborasi bersama pihak-pihak lain dalam melakukan pembangunan pariwisata.
2. Kelanjutan dari hasil analisi potensi yang dilakukan diharapkan dapat direalisasikan menjadi tempat wisata yang dikelola dengan

baik serta dilakukan perbaikan beberapa akses jalan.

3. Perlu dibuat kegiatan yang menarik minat masyarakat untuk dapat konsisten membuat produk UMKM dan souvenir khas Desa Watukarung.
4. Perlu perhatian dan dukungan lebih dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata.
5. Perlu dilakukan berbagai promosi wisata salah satunya melalui pembuatan paket-paket wisata di Desa Watukarung.

DAFTAR PUSTAKA

- Airin, R. K. (2019). Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurahan Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *Jurnal Internasional*. <https://lib.unnes.ac.id/33847/>
- Amirudin, A. (2018). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p26-32>
- Andriyanto, F., & Wihayati, A. (2021). Peran Pokdarwis Dewa Bejo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Bejiharjo. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan ...*, 6(November), 115–131. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i2.1794>
- BPS. (2020). Kabupaten Pacitan. *Bps*, 8.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159–175.
- Evitin, E., & Widodo, B. S. (2016). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Pengembangan Potensi Wisata Goa Gong). *Jurnal Swara Bhumi*, 3(3), 109–115.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed., Issue March). Pustaka Ilmu.
- Karini, R. S. R. A., & Agustiani, I. N. (2019). KONTRIBUSI PENERIMAAN PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG. *Tourism Scientific Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.32659/tsj.v4i1.51>
- Luthfi, R. R. (2013). Peran Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Sektor Lapangan Pekerjaan Dan Perekonomian Tahun 2009-2013 (Studi Kasus : Kota Batu). *Jurnal Ilmiah*, 1(2).
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (3rd ed.). Alfabeta.
- Nawangsari, E. R. (2017). Analisis Program

- Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p12-16>
- Nugroho, W., & Sugiarti, R. (2018). Analisis Potensi Wisata Kampung Sayur Organik Ngemplak Sutan Mojosoongo Berdasarkan Komponen Pariwisata 6A. *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 35–40.
- Nurwahyuni, N. E., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Publika*, 9(2), 109–120.
- Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Di Destinasi Pariwisata, 56 (2012).
- Ramdhani, D. S., & Rahaju, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Komunitas Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya). *Publika*, 10(3), 9–25.
- Sabtimarli. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi Di Dusunsambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi Di Dusunsambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan. *Halal Product and Research (JHPR)*, 01(02), 32–43.
- Sayogi, K. W., & Demartoto, A. (2018). Pengembangan Pariwisata Bahari (Studi Deskriptif Pada Pelaku Pengembangan Pariwisata Bahari Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 9–17.
<https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.20728>
- Susanti, E., & Aidar, N. (2017). Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Manfaat Bagi Masyarakat Sekitar Wisata Alam Taman Rusa Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 2(1), 94–104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimekp.v2i1.2461>
- Tanjung, A. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli*. Volume XII(April), 155–172.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pub. L. No. 10, 59 (2009).